

RINGKASAN EKSEKUTIF
PERLAMBATAN EKONOMI, PHK DAN PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN:
SEBUAH NASKAH KEBIJAKAN

Henriko Tobing, dkk. henrikotobing.ht@gmail.com

Perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia belakangan ini sebenarnya sudah dirasakan sejak tahun 2008 paska terjadinya krisis yang melanda pasar keuangan global. Namun, kontraksi atau perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini dirasa begitu mengkhawatirkan karena diikuti oleh pelemahan rupiah yang cukup dalam, masyarakat seperti diingatkan kembali pada apa yang pernah terjadi di tahun 1998. Dampak perlambatan ini tentunya akan mempengaruhi berbagai sektor termasuk ketenagakerjaan.

Penelitian ini mencoba menganalisa dampak perlambatan ekonomi yang terjadi terhadap permasalahan ketenagakerjaan khususnya tingkat pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menemukan respon yang tepat atau kebijakan yang sesuai dari sisi ketenagakerjaan yang dapat dilakukan untuk membantu memperbaiki keadaan.

Penelitian ini memberikan implikasi manajerial mengenai langkah-langkah yang dapat diambil khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya mendorong iklim perekonomian kearah yang lebih baik.

Data peneiltian diperoleh dari berbagai sumber baik literatur pustaka, laporan hasil pengumpulan data primer maupun media online. Data primer dikumpulkan dari empat lokasi penelitian yaitu Kab. Ungaran, Bogor, Kota Tangerang Selatan dan kota Bandung melalui teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap para responden yang terdiri dari akademisi, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh dan para pekerja yang terdampak PHK. Analisis data menggunakan model *regresi linear* dengan alat bantu Eviews 6. serta deskripsi statistik dalam bentuk grafik dan tabel. Untuk menganalisa pilihan kebijakan digunakan matrik pilihan kebijakan yang berisi beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari setiap program yang tersedia khususnya pada program perluasan kesempatan kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Analisa lingkungan strategis (SWOT) digunakan untuk menganalisa program terpilih dan membantu dalam menyusun saran perbaikan atau implementasi dari progam tersebut.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 1) Indonesia tidak sedang dalam kondisi krisis namun rentan terhadap guncangan perekonomian, 2) Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, 3) Perlambatan ekonomi tidak serta merta berpengaruh terhadap jumlah PHK, 4) Permasalahan fundamental ketenagakerjaan sebenarnya bukan terletak pada tingkat pengangguran namun pada besarnya jumlah pekerja miskin, 5) Keseluruhan responden merupakan pekerja ter PHK yang umumnya adalah pekerja muda dengan masa kerja baru dan pekerja yang mendekati masa pensiun dimana terbanyak berjenis kelamin perempuan, 6) Program perluasan kesempatan kerja berbasis wirausaha menjadi program yang paling sesuai untuk dikembangkan dalam kondisi perlambatan ekonomi seperti sekarang.

Program berbasis wirausaha harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, dalam sebuah rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, fokus pada kualitas

bukan kuantitas dengan target para pekerja perempuan menjelang masa pensiun yang terdampak PHK serta para pekerja miskin (*poor workers*) dan atau keluarganya. Untuk memperluas cakupan (masif) dan menjamin peluang keberhasilan program dibutuhkan sinergitas dengan instansi terkait, perusahaan dan Non Government Organisation (NGO) dalam implementasi dan pengawasan kegiatannya.

Pada masa krisis ekonomi program berbasis padat karya menjadi program yang paling sesuai dilakukan karena sifatnya sementara dan merupakan jaring pengaman, pada masa kontraksi atau perlambatan ekonomi, program berbasis wirausaha (TKM, wirausaha baru, padat karya produktif dll.) menjadi program yang paling sesuai dalam upaya membangun basis ekonomi dan memiliki efek pengganda langsung terhadap perluasan kesempatan kerja.

Program perluasan kesempatan kerja harus didasarkan pada kondisi perekonomian yang ada sehingga implikasinya pada perubahan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran yang ada.